BAB II
RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

2.1 Sejarah Singkat PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

2.1.1 Masa Penjajahan Belanda

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-IX, pada saat beberapa perusahaan Balanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NVNIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Dengan menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II, maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karenanya Perusahaan Listrik dan Gas yang diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebuut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka kesempatan yang baik dimanfaatkan oleh pemuda, buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang

Setelah selesai merebut Perusahaan Listrik dan Gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945 Delegasi dari buruh/ pegawai listrik dan gas yang diketuai oleh Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya Delegasi Kobarsih bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk

menyerahkan perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah Tahun 1945 Nomor I sampai dengan tertanggal 27 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Sekertaris Negara, AG. Pringgooodogdo maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas sumatera, Jawa, dan Madura di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas. Hari tersebut telah diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Komite Nasional Pusat (BKPNIP), Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975. Peringatan Hari Listrik dan Gas kemudian digabung dengan Hari Kebangkitan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember.

Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah, daerah otonom (gemente), swasta maupun gabungan antara pemerintah dengan swasta. Di Jawa Barat (khususnya kota Bandung) perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu *Bandoengsche Electriciteit Maatschappij* (BEM) yang berdiri pada tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah Perusahaan

Perseroan Gemeem-schappelijk Electriciteit BeddriffVoor Bandoeng (GBBEO) yang menggantikan BEM dengan Akte Pendirian Notaris Mr. Adrian Hendrik Van Ophuisen No. 213 tanggal 31 Desember 1919

2.1.2 Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja seluruh Jawa.

2.1.3 Setelah Proklamasi Kemerdekaan sampai Sekarang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari Pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal pengolahan penguasaan perlistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai adanya Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh Pemerintah RI yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 1958 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan nama PLN Exploitas XI sebagai kesatuan BPU-PLN Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUTI No. 013/PRT/1957 tanggal 8 september 1957 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI No. 05/III/Sek/1975 tanggal 16 juli 1975 PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994.

Kemudian berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 120.K/010/DIR/2002 tentang Pengalihan Nama Unit Bisnis Distribusi Jawa barat menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sejak tanggal 27 Agustus 2002 sampai sekarang.

Sedangkan susunan organisasi ditetapkan oleh Kepustusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 014.K/010/DIR/2003 tanggal 16 Januari 2003. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mempunyai 15 (lima belas) Area Pelayanan dan Jaringan, 1 (satu) Area Pengatur Distribusi, dan 1 (satu) kantor Distribusi, yang bila diperinci terdiri dari :

a. APJ Cirebon
b. APJ Tasikmalaya
c. APJ Garut
d. APJ Cianjur
e. APJ Sukabumi
f. APJ Bogor
g. APJ Banten
h. APJ Purwakarta
i. APJ Cimahi
j. APJ Bandung
k. APJ Majalaya
l. APJ Bekasi
m. APJ Depok
n. APJ Sumedang
o. APJ Karawang
p. Area Pengatur Distribusi

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

PT. PLN (Persero) UPJ Sumber ini berlokasi Jl.R. Dewi Sartika No.130 Sumber dan Kedudukan PT. PLN (Persero) UPJ Sumber itu sendiri berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan PT. PLN (Persero) APJ Cirebon.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahan

PT. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka bentuk Perusahan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak 30 Juli 1994 sesuai dengan akte pendirian. Kemudian setelah ada pemekaran provinsi Jawa Barat menjadi dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten, maka sebutan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, karena ada sebagian APJ PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat berada diwilayah Banten.

2.4 Bidang Usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten bergerak pada bidang pelayanan jasa kelistrikan. Selain itu PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten juga bergerak sebagai organisasi semi profit, yaitu memberikan pelayanan jasa kelistrikan untuk memperoleh keuntungan atau laba, dengan laba tersebut akan mampu mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kelistrikannya.

2.4.1 Tugas dan Fungsi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah pengusahaan, pendistribusian dan penjualan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu

yang memadai untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat, memperhatikan kepentingan *stake holder*, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

Karena begitu banyaknya unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, maka penulis hanya akan menerangkan tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi unsur tertentu saja, khususnya yang berhubungan dengan objek yang penulis bahas.

1. General Manager

General Manager mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memimpin, mengurus, dan mengelola Distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan Distribusi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Distribusi

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Distribusi

c. Mewakili Distribusi di dalam dan di luar Pengadilan

d. Melaksanakan kebijakan umum dalam mengurus Distribusi yang telah digariskan oleh Direksi

e. Menetapkan kebijakan Distribusi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Direksi

f. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Distribusi lengkap dengan anggaran keuangan

g. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan

h. Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

i. Menetapkan kebijaksanaan Distribusi di bidang perencanaan, pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik, pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan sumber daya manusia

j. Mengolah dan mengendalikan seluruh kegiatan Distribusi berdasarkan kebijaksanaan Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

k. Mengendalikan pelaksanaan tugas para Deputi Pemimpin dan Kepala Kontrol Intern

l. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dengan persetujuan Direksi dalam rangka mengembangkan pendistribusian tenaga listrik

2. Manager

Para Manager mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memimpin dan melaksanakan seluruh kegiatan tata laksana bidang yang dipimpinnya

b. Bertindak atas nama Pemimpin dalam bidang masing-masing

c. Memberikan bahan-bahan pertimbangan dan saran-saran dalam menetapkan kebijakan atau keputusan Pemimpin

d. Menangani masalah-masalah yang bersifat strategis seperti perencanaan koorperat, pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik,

pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik, pelayanan pelanggan, keuangan dan sumber daya manusia.

3. Manager Perencanaan

Tugas pokok Manager Perencanaan adalah :

a. Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RPJ), dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
b. Menyusun rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan
c. Menyusun sistem manajemen kinerja ketenagalistrikan
d. Menyusun metode evaluasi kelaayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya
e. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyandang dana, baik secara bilateral maupun multilateral
f. Menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi
g. Mengendalikan aplikasi-aplikasi teknologi informasi
h. Menyiapkan SOP pengelolaan aplikasi sistem informasi
i. Menyusun laporan manajemen
j. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penetapan pengaturannya

Bidang Perencanaan terdiri dari :

1. Deputi Manager Perencanaan Koorporat
2. Deputi Manager Pengendalian Sistem Teknologi Informasi
   a. SVP OPS Aplikasi Teknologi Informasi

b. SVP OPS Jaringan TI & Multi Media

c. SVP Layanan Data Base

4. Manager Distribusi

Tugas pokok Manager Distribusi adalah :

a. Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan membeli penerapannya

b. Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan distribusi dan membina penerapannya

c. Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi, serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi

d. Menyusun desain standar kontruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya

e. Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta saran perbaikannya

f. Menyusun metode kegiatan kontruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya

g. Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan manajemen perbekalan distribusi serta membina penerapanya

h. Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi

i. Menyusun regulasi untuk penyempurnaan data induk jaringan (DIJ)

j. Memantau dan mengevaluasi data induk jaringan

Bidang distribusi terdiri dari :

1. Deputi Manager Pengembangan Sistem Distribusi
2. Deputi Manager Pengendalian Distribusi

5. Manager Niaga

Tugas pokok Manager Niaga adalah :

a. Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran
b. Menyusun rencana penjualan energi dan rencana pendapatan
c. Mengevaluasi harga jual energi listrik
d. Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan
e. Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan
f. Menyusun standar dan produk pelayanan
g. Menyusun ketentuan data induk pelanggan (DIL) dan data induk saldo (DIS) serta kontrak jual beli tenaga listrik
h. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun rencana penyempurnaannya
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu antara lain TNI/POLRI dan Instansi Vertikal
j. Melakukan pengendalian DIS dan opname saldo piutang
k. Menyusun konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan
l. Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana
m. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta pengaturannya
n. Menyusun laporan manajemen bidangnya
   1) SVP Tagihan PLG tertentu
   2) SVP Evaluasi Dis & Saldo Piutang

3) SVP Transaksi Jual & Beli KWH

6. Manager Keuangan

Bidang keuangan terdiri dari :

Tugas pokok Manager Keuangan aadalah :

a. Mengendalikan aliran kas pendapartan dan membuat laporan rekonsiliasi keuangan
b. Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta rencana aaliran kas pembiayaan
c. Melakukan analisis dan evaluasi laporan keuangan unit-unit serta menyusun laporan keuangan konsolidasi
d. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan asset
e. Melakukan pengelolaan keuangan
f. Menyusun laporan manajemen dibidangnya

Bidang keuangan terdiri dari :

1. Deputi Manager Pengelolaan Keuangan
2. Deputi Manager Pendapatan
3. Deputi Manager Pengendalian Anggaran dan Pendanaan
4. Deputi Manager Akuntansi
    a. SVP Akuntansi Biaya
    b. SVP Akun, AT & PDP

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

7. Manager Sumberdaya Manusia dan Organisasi

Tugas pokok Manager Sumberdaya Manusia adalah :

a. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola pelaksanaannya
b. Menyusun kebijakan manajemen sumberdaya manusia dan mengelola pelaksanaannya
c. Menyusun kebijakan pengembangan sumberdaya manusia dan mengelola pelaksanaannya
d. Mengkaji usulan pengembangan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia
e. Menyusun laporan manajemen dibidangnya

Bidang sumberdaya manusia dan organisasi terdiri dari :

1. Deputi Manager Administrasi Sumberdaya Manusia
2. Deputi Manager Pengembangan Sumberdaya Manusia

8. Manager Komunikasi, Hukum dan Administrasi

Tugas pokok bidang komunikasi, hukum dan administrasi adalah :

a. Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan baik internal maupun eksternal
b. Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan dan manajemen kantor
c. Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan *community development*
d. Menyusun kebijakan administrasi

e. Menyusun dan mengkaji produk-produk hukum dan peraturan-peraturan perusahaan

f. Memberikan advokat dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan

g. Menyusun standar fasilitas kantor

h. Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja

i. Mengelola keseketariatan dan rumah tangga kantor induk

j. Menyusun laporan manajemen dibidangnya

1) SVP Sekretariat

2) SVP Pelayanan Umum

3) SVP Pengelolaan Asset

9. Kepala Audit Internal

Tugas pokok Kepala Audit Internal adalah :

a. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan, sesuai program kerja perusahaan

b. Melaksanakan audit internal, meliputi keuangan, teknik, manajemen dan sumberdaya manusia

c. Memberikan masukan dan rekomendasi yang menyangkut proses manajemen dan operasional

d. Memonitor tindak lanjut temuan hasil audit internal

e. Menyusun laporan manajemen dibidangnya

Audit Internal terbagi atas :

1. Audit Sistem Distribusi

2. Audit Sistem Administrasi dan Umum

3. Audit Keuangan dan Pendapatan

4. Audit Mutu Layanan

10. Area Pelayanan dan Jaringan

Tugas pokok Area Pelayanan dan Jaringan adalah Kinerja Perusahaan, Citra Perusahaan, *Good Corporate Government* (GCG), Hubungan Kerja dan Komunikasi yang Efektif, Pembinaan dan Pengembangan SDM, Pembinaan kepada UP, UJ, UPJ dan Audit UP, UJ, UPJ.

2.4.2 Maksud dan Tujuan, Misi dan Visi Perusahaan

2.4.2.1 Maksud dan Tujuan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

1) Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekalipun memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
2) Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan, yaitu untuk :
   a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi
   b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat
3) Merintis kegiatan-kegiatan usaha pengeluaran tenaga listrik
4) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundangan yang berlaku

2.4.2.2 Misi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lainnya yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham
2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

2.4.2.3 Visi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi / Departemen Tempat Kerja Praktek

Bidang / divisi tempat Kerja Praktek berlangsung dibagian Kepegawaian yaitu pada bidang IT, khususnya dibagian Server Komputer

2.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan salah satu unsur dari pengendalian. Hal ini menyebabkan adanya struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting, dengan adanya struktur organisasi ini maka akan mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Struktur organisasi dan tugas pokok PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 117/DIR/85 tanggal 14 Agustus 1985 dan dilengkapi dengan Surat Keputusan General Manager No. 024.K/021/ GM.DJBB/2003 tanggal 21 Maret 2003.

Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan organisasi garis fungsional dan staff, jenjang manajemen meliputi unsur pimpinan, pembantu pimpinan, pelayanan dan pelaksana. Selain itu ada unsur pengawas yaitu Kepala Audit Intenal yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan yang merupakan pejabat tertinggi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah General Manager

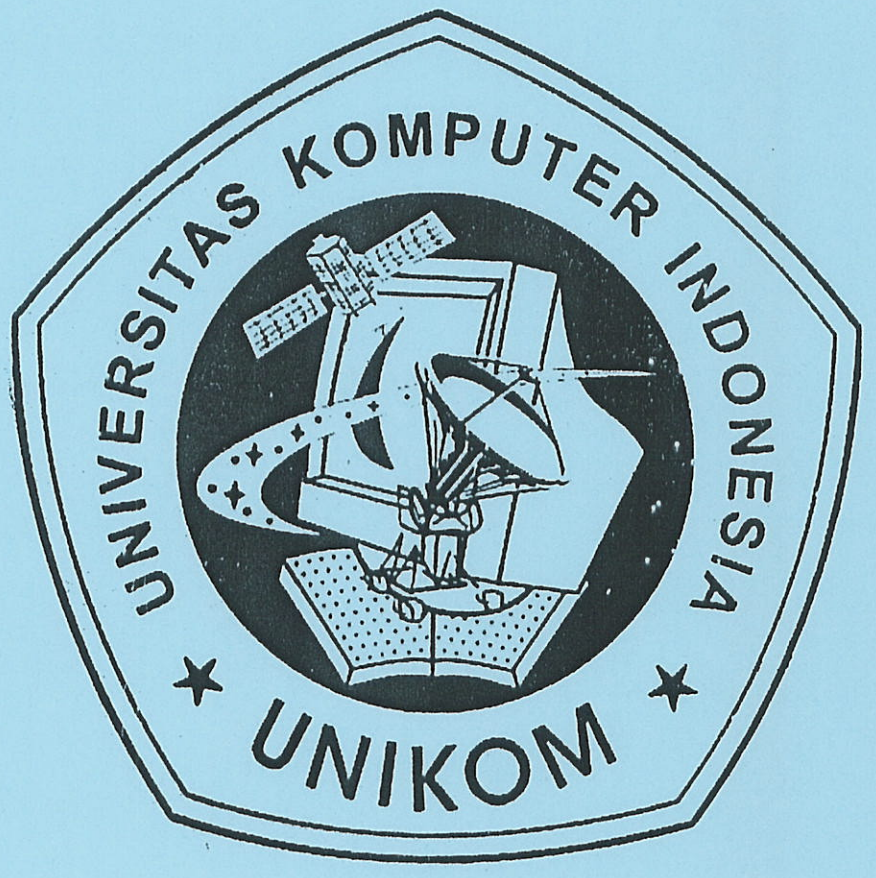
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah :

   1. Manager Perencanaan
   2. Manager Distribusi
   3. Manager Niaga
   4. Manager Keuangan
   5. Manager SDM dan Organisasi
   6. Manager Komunikasi, Hukum dan Administrasi

c. Unsur Pelaksana adalah :

   1. Area Pengatur Distribusi (APD)
   2. Area Pelayanan dan Jaringan (APJ)

d. Unsur Pengawasan adalah Audit Internal


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM